

**SISTEM EKONOMI ISLAM SEBAGAI PONDASI EKONOMI
MASYARAKAT MELAYU DALAM MENGHADAPI
ASEAN *Economic Community* (AEC)**

Muhammad Fadhil Junery

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751
Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134
Email: longfadhil@gmail.com

Abstract

Islam besides having fikrah (draft) also has thariqoh (method) how to apply the concepts that already exist. The basic principle of Islamic economic system, namely: the principle of individual freedom, the principle of property rights, the principle of economic inequality within reasonable limits, the principle of social security, Social security principle, the principle of the widespread distribution of wealth, the prohibition to accumulate wealth principle, the principle of the prohibition against anti-social organizations and the principle of the welfare of individuals and society. A major culture shift is needed in developing the local economy. Although the central and local governments have run a populist economic program, but the high jump should be made to cross the chasm that separates culture bedagang farmers and small-scale to sophisticated commercial culture. Initial concrete steps to develop the economy with the concept of community empowerment in facing the ASEAN Economic Community (AEC), namely: First, apply the Islamic economy. Second, the community mental preparation. Third, strengthen the potential resources owned or public (empowering).

Keywords: *Islamic economic system, fikrah (draft), thariqoh (method), ASEAN Economic Community*

A. Pendahuluan

Globalisasi merupakan sebuah keharusan dan realita abad ini, yang membuat masyarakat dunia seperti berada dalam ruangan tanpa batas. Tidak ada satu negara pun yang bisa bebas dari realita ini, dan yang harus dilakukan masyarakat Melayu adalah memperkuat diri agar masyarakat Melayu tidak menjadi pihak yang dirugikan di era ini.

Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat Melayu pernah mengalami masa gemilang. Perdagangan yang dijalankan masyarakat Melayu mampu merambah berbagai belahan dunia pada masanya. Bahkan pada era Sultan Iskandar Muda berkuasa di Aceh, kerajaan Aceh termasuk dalam lima kerajaan terbesar di dunia. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Aceh, Malaka, dan Demak tak dapat dipungkiri menjadi tonggak kebesaran rumpun Melayu. Tidak dinafikan bahwa Melayu saat itu memiliki jati diri yang kuat, mampu

menyesuaikan diri terhadap perubahan, berdaya tahan tinggi dan berperan aktif dalam kesinambungan kehidupan bangsa.

Namun, saat ini perekonomian masyarakat Melayu jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Barat dan masyarakat China. Salah satu penyebabnya adalah kesadaran masyarakat Melayu sebagai saudara serumpun makin berkurang, puak-puak Melayu tercerai berai akibat dari politik pecah belah (*adudomba*) pemerintah kolonial, dan masyarakat Melayu termarginalisasi akibat perkembangan kapitalisasi dan globalisasi.

Keunggulan ekonomi masyarakat Melayu pernah gemilang pada masa silam dibangun dengan semangat ke-Melayu-an dan berteraskan Islam itulah yang menjadi faktor penggerak dan pendorongnya, yang memberi warna baru dan mempercepat terwujudnya sistem dan keunggulan Melayu, sehingga jejak Melayu nampak dimana-mana. Bisakah sejarah itu berulang kembali? Jawabannya ada pada setiap individu masyarakat Melayu itu sendiri.

Menurut Selo Sumarjan, masyarakat Melayu terbiasa dengan pekerjaan yang lebih berorientasi pada kehidupan bermasyarakat (*socially oriented*) daripada yang bersifat material (*material oriented*)¹. Ini menunjukkan masyarakat Melayu lebih menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan gotong royong daripada sikap individualisme, yang dalam satu dekade belakangan ini semakin besar seiring dengan perkembangan kapitalisme yang mendunia.

Setelah sekian lama masyarakat Melayu mengalami keterpurukan dan ketertinggalan dibidang ekonomi, kini saatnya masyarakat Melayu harus bangkit, bahu-membahu merapatkan barisan, membangun jati diri yang kuat, mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, berdaya saing tinggi dan berperan aktif dari semua sektor untuk memberi warna baru dan mempercepat terwujudnya sistem dan keunggulan Melayu dengan semangat ke-Melayu-an dan berteraskan Islam.

Krisis moneter dan ekonomi yang melanda dunia beberapa waktu lalu hingga sekarang ini membawa akibat yang cukup parah, tidak terkecuali bagi perekonomian Indonesia. Tragedi keterpurukan perekonomian Indonesia dapat menjadi pelajaran bagi perumusan kebijakan publik dan perundang-undangan, untuk meninjau kembali kebijakan yang selama ini tertuju pada perusahaan-perusahaan besar untuk dialihkan pada sektor usaha kecil menengah.

Sektor usaha kecil menengah ternyata memiliki daya tahan yang tinggi sehingga mampu bertahan terhadap badai krisis ekonomi dan moneter. Pembinaan dan perlindungan usaha kecil menengah, terutama pada masa krisis ini sangat strategis karena diperkirakan akan dapat menghasilkan nilai tambah (*value added*) yang memadai karena unit usahanya yang cukup

¹ M. Isa Selamat, *Riau Menuju Jalan Puncak*, Pusat Kajian Warisan Melayu Riau, Bengkalis, 2001, hal. 82.

banyak. Dengan usaha kecil menengah, akan terserap banyak tenaga kerja melalui usaha padat karya (*labour intensive*), dan dapat memperluas kesempatan berusaha dan memperoleh pemerataan pendapatan.

Kegagalan sistem ekonomi, baik sistem ekonomi sosialis yang berporos pada begitu besarnya peran pemerintah terhadap kehidupan rakyat, yang kemudian runtuh dengan tumbangnya rezim komunis Uni sovyet, juga ekonomi kapitalis, yang menyebabkan kekayaan terpusat pada segelintir orang atau negara, dan menyebabkan semakin besarnya gap/ketimpangan antara kaya dan miskin, membuat banyak orang kemudian berfikir untuk terus mencari alternatif sistem ekonomi yang dapat memecahkan masalah akibat kegagalan dua sistem tersebut.

Salah satu alasan mengapa ekonomi kerakyatan perlu dijadikan paradigma baru dan strategi baru dalam membangun ekonomi adalah karena kegagalan pelaksanaan sistem ekonomi. Indonesia, negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, pun mengalami hal serupa, dengan krisis yang berkepanjangan yang sampai saat ini bahkan belum seorang ahli pun yang memastikan bahwa indonesia telah keluar dari krisis. Saat ini, berjuta-juta orang menganggur, puluhan juta orang berada dibawah garis kemiskinan, sektor moneter yang semakin jauh dari sektor riil sehingga berpotensi meledakkan *bubble economic* yang sudah terbentuk, dan berbagai macam masalah melingkupi kehidupan perekonomian kita. Ini pula yang menyebabkan bangsa ini kembali berfikir untuk mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih dapat mensejahterakan rakyat. Ekonomi Islam yang sebenarnya sudah ada ribuan tahun yang lalu (sejak jaman Rasulullah) perlahan kembali bangkit dan menggeliat. Ekonomi kerakyatan, sebagai khazanah asli pemikiran ekonom indonesia pun mulai diperbincangkan orang.

B. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (*popular*) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi subsisten antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan

lainnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada.

Menurut Guru Besar, FE UGM (alm) Prof. Dr. Mubyarto, *sistem Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam prakteknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (network) yang menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik diantara sentra dan pelaku usaha masyarakat.*²

Ekonomi kerakyatan memang bukanlah sebuah mazhab ekonomi baru, namun ia hanya sebagai melainkan suatu konstruksi pemahaman dari realita ekonomi yang umum terdapat di negara berkembang. Ekonomi rakyat tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Perlu dipahami bahwa dalam ruang ekonomi nasional pun terdapat sejumlah aktor ekonomi (konglomerat) dengan bentuk usaha yang kontras dengan apa yang diragakan oleh sebagian besar pelaku ekonomi rakyat. Memiliki modal yang besar, mempunyai akses pasar yang luas, menguasai usaha disetiap penjuru pasar, menguasai teknologi produksi dan manajemen usaha modern. Namun mereka tidak digolongkan dalam ekonomi kerakyatan, karena jumlahnya hanya sedikit sehingga tidak merupakan representasi dari kondisi ekonomi rakyat yang sebenarnya.

Lahirnya sejumlah pengusaha besar (konglomerat) yang bukan merupakan hasil derivasi dari kemampuan manajemen bisnis yang baik menyebabkan fondasi ekonomi nasional yang dibangun berstruktur rapuh terhadap persaingan pasar. Mereka tidak bisa diandalkan untuk menopang perekonomian nasional dalam sistem ekonomi pasar. Padahal ekonomi pasar diperlukan untuk menentukan harga yang tepat (*price right*) untuk menentukan posisi tawar-menawar yangimbang. Perlu digaris bawahi bahwa yang patut mendapat kesalahan terhadap kegagalan pembangunan ekonomi nasional selama rezim orde baru adalah implementasi kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang tidak tepat dalam sistem ekonomi pasar, bukan ekonomi pasar itu sendiri. Dalam pemahaman seperti ini, saya merasa kurang memiliki justifikasi empirik untuk mempertanyakan kembali sistem ekonomi pasar, lalu mencari suatu sistem dan paradigma baru di luar sistem ekonomi pasar untuk dirujuk dalam pembangunan ekonomi nasional.³

² <http://sucasary.wordpress.com/2008/12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan/>

³ Fredrik Benu, *Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Suatu Kajian Konseptual*, Makalah Seminar Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Provinsi NTT, Kupang, tanggal 26 Nopember 2002.

Sebagai daerah agraris, sektor pertanian memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Pentingnya sektor pertanian diantaranya sebagai andalan mata pencarian sebagian besar masyarakat, sumbangannya terhadap PDB (*Produk Domestik Bruto*), bahan baku industri, serta dalam penyediaan bahan pangan dan gizi. Beberapa sektor pertanian juga terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian saat terjadinya krisis ekonomi.

Ekonomi yang digerakkan oleh usaha-usaha rakyat, terutama usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh rakyat banyak, untuk kemudian hasilnya akan kembali kepada rakyat. Karena sifatnya yang merata, persebaran modal yang baik, sistem ekonomi yang benar-benar bergerak dalam sektor riil, ekonomi rakyat mempunyai dampak pemerataan terhadap pendapatan yang baik, dan mampu menggerakkan sektor riil secara efektif.

Berdasarkan hal tersebut, nampaknya titik fokus ekonomi rakyat adalah bagaimana memberdayakan rakyat dalam perekonomian dan keberpihakan ekonomi kepada rakyat, memastikan tidak terjadinya ketidakadilan ekonomi karena adanya perlakuan yang tidak sama antara pemilik modal besar dengan rakyat sehingga timbul ketimpangan ekonomi.

Perlu diingat bahwa ekonomi kerakyatan tidak akan mewujudkan pembangunan ekonomi yang maju, jika ekonomi kerakyatan hanya sekedar komitmen politik untuk merubah kecenderungan dalam sistem ekonomi kapitalis yang amat membela kaum pengusaha besar khususnya para konglomerat. Akan tetapi pelaksanaan perubahan itu harus diiringi dengan implementasi dengan benar-benar memberi perhatian utama kepada rakyat kecil lewat program-program operasional yang riil dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif ditingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa membangun ekonomi kerakyatan membutuhkan adanya komitmen politik (*political will*), tetapi menyamakan ekonomi kerakyatan dengan praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil, adalah sesuatu kekeliruan besar dalam perspektif ekonomi kerakyatan yang benar. Praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil sangat tidak menguntungkan pihak manapun, termasuk rakyat kecil sendiri (Bandingkan dengan pendapat Ignas Kleden, 2000). Pendekatan seperti ini jelas sangat berbeda dengan apa yang dimaksud dengan *affirmative action*. Aksi membagi-bagi uang secara tidak sadar menyebabkan usaha kecil-menengah dan koperasi yang selama ini tidak berdaya untuk bersaing dalam suatu mekanisme pasar, menjadi sangat tergantung pada aksi dimaksud.

Sebenarnya yang harus ada pada tangan obyek *affirmative action* adalah kesempatan untuk berkembang dalam suatu mekanisme pasar yang sehat, bukan *cash money/cash material*. Jika pemahaman ini tidak dibangun sejak awal, maka saya khawatir cerita keberpihakan yang salah selama masa orde baru kembali akan terulang. Tidak terjadi proses pendewasaan (*maturity*)

dalam ragaan bisnis usaha kecil-menengah dan koperasi yang menjadi target *affirmative action policy*. Bahkan sangat mungkin terjadi suatu proses yang bersifat *counter-productive*, karena asumsi awal yang dianut adalah usaha kecil-menengah dan koperasi yang merupakan ciri ekonomi kerakyatan Indonesia tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya insentif artifisial apapun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta peluang pasar. Modal dasar yang dimiliki inilah yang seharusnya ditumbuhkembangkan dalam suatu mekanisme pasar yang sehat. Bukan sebaliknya menghilangkan sesuatu yang tadinya menjadi modal dasar dengan menciptakan ketergantungan sistem baru yang kebijakannya cenderung keberpihakan yang pada finisnya menambah kesengsaraan bagi rakyat.

Selanjutnya, pemerintah harus sudah mempunyai *planing* yang pasti tentang kapan seharusnya pemerintah mengurangi bentuk campur tangan dalam *affirmative action policy*nya, untuk mendorong ekonomi kerakyatan berkembang secara sehat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian ekonomi yang akurat tentang *timing* dan *process* dimana pemerintah harus mengurangi bentuk keberpihakannya pada usaha kecil-menengah dan koperasi dalam pembangunan ekonomi rakyat.

C. Sistem Ekonomi Islam

Sebenarnya antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam tak ada pertentangan. Jika yang dimaksud kerakyatan adalah pemberdayaan dan keberpihakan terhadap rakyat hal tersebut senada dengan ruh Islam yang memerangi monopoli. Juga sebaliknya Islam yang ingin ada pemerataan kesejahteraan sangat berkepentingan untuk memberdayakan rakyat. Islam adalah ruh dan nilai dari kegiatan dan sistem ekonomi bangsa. Sistemnya bisa ekonomi kerakyatan atau yang lainnya. Aplikasinya bisa disesuaikan keadaan. Karena pada dasarnya harta kekayaan merupakan sarana untuk meningkatkan hubungan baik dengan Allah dan meningkatkan kebaikan kepada sesama makhluk,⁴ meskipun untuk meraihnya diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dengan memerangi kebodohan dan kemalasan. Keduanya memiliki kesamaan berupa pemerataan kesejahteraan.

Rakyat bisa mendapatkan tempat tinggal yang baik, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, kebutuhan pangan yang tidak menyulitkan serta kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat terpenuhi⁵. Itulah setidaknya letak keberpihakan pemerintah yang paling minimal, kemudian potensi kekayaan masyarakat tersebut dioptimalkan. Jika porsi optimalisasi ini maksimal maka

⁴ DR. Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Cet. I, Jakarta: Rabbani Perss, 1997, hal.90.

⁵ Abdullah Nasih Ulwan, *at-Takaful al-Ijtima'iy fi al-Islam*, Cairo: Maktabah Usrah, 2001, hal.19.

akan menjadi sebuah ekonomi nasional yang kuat dan mapan. Prinsip dasar sistem ekonomi Islam, yakni:⁶

- a) Kebebasan individu. Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat sesuatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam.
- b) Hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.
- c) Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam memberikan batas-batas wajar, adil dan tidak berlebihan.
- d) Keamanan sosial. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial.
- e) Jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam dan dijamin oleh negara.
- f) Distribusi kekayaan secara meluas. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan pada semua lapisan masyarakat.
- g) Larangan menumpuk kekayaan. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut.
- h) Larangan terhadap organisasi anti sosial. Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, minum arak, riba, menumpuk harta, pasar gelap dan sebagainya.
- i) Kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka.

D. Strategi Ekonomi Kerakyatan (SEK) Menghadapi ASEAN *Economic Community* (AEC) 2015

Prinsip-prinsip dasar dari sistem ekonomi kerakyatan, secara teori terdapat keselarasan antara sistem ekonomi kerakyatan dengan ekonomi Islam. Sebab prinsip-prinsip dari ekonomi Islam itu sendiri adalah harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan, keterbukaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya demi kemaslahatan ummat, juga menganut prinsip universalitas yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'alamiin*. Lalu kenapa Indonesia masih tertinggal jauh bahkan terpuruk secara ekonomi di banding dengan negara-negara yang lain? padahal Indonesia telah memiliki suatu sistem ekonomi yang baik yang selaras

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo, Jilid I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal.8.

dengan sistem ekonomi Islam yang telah terbukti menjadi solusi ampuh ketika mayoritas negara didera oleh krisis moneter yang berkepanjangan di masa lalu? Jawabannya adalah karena kita masih belum mau melaksanakan sistem ekonomi Islam tersebut secara utuh, konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan dari sistem ekonomi tersebut.

Deklarasi Bangkok tahun 1967 merupakan awal dimulainya kerja sama ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya dikalangan negara-negara ASEAN. Pada bulan Januari 2007, disepakati untuk mempercepat pencapaian ASEAN *Economic Community* (AEC) yang semula tahun 2020 menjadi tahun 2015. Diberlakukannya ASEAN *Economic Community* (AEC) 2015 dan pasar bebas Asia Pasifik, membuat setiap negara menyiapkan diri untuk menyongsongnya, tidak terkecuali Indonesia. Sudah siapkah Indonesia? Siap tidak siap, harus siap. Mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri dalam waktu singkat ini.

Salah satu cara untuk menjawab tantangan tersebut antara lain memperkuat sistem ekonomi kerakyatan dengan berlandaskan ekonomi Islam. Dengan rencana strategis serta dengan konsepsi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pengembangan ekonomi kerakyatan perlu diarahkan kepada perubahan struktural yakni dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi kerakyatan dalam perekonomian nasional. Dan mengikuti perkembangan terkini dan wawasan jauh ke depan, sehingga diharapkan terjadi proses perubahan dari tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan (*defedency*) kepada kemandirian (*indefedency*).

Langkah kongkrit awal dalam membangun ekonomi dengan konsepsi pemberdayaan masyarakat, yaitu : *Pertama*, menerapkan ekonomi Islam. Sebagian pihak antipati dengan ekonomi Islam, karena selalu dikaitkan dengan perkembangan politik yang menyamakannya dengan bahaya teroris. Padahal misi yang dibawa ekonomi Islam senada/tidak jauh beda dengan ekonomi kerakyatan. *Kedua*, persiapan mental masyarakat. Penulis mengutip moto dari Bapak Ir. H. Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) yakni "*revolusi mental*", karena tanggungjawab membangun dan memajukan ekonomi bukan terletak pada bahu pemerintah saja, tetapi perlu kerjasama yang jitu dari masyarakat. Karena betapapun peluang disediakan jika semangat masyarakat masih dalam lingkaran "*tak ade urusan*" (masa bodoh), maka kejayaan pembangunan ekonomi sukar diwujudkan. *Ketiga*, memperkuat potensi atau sumberdaya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Usaha memperkuat modal dasar yakni memperkuat potensi sumberdaya manusia (dengan pendidikan/pelatihan) serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Poin ini juga menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh

masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini

E. Kesimpulan dan Penutup

Islam selain memiliki *fikrah* (konsep) juga memiliki *thariqoh* (metode) bagaimana menerapkan konsep yang telah ada tersebut. Lebih dari itu, konsep Islam antara satu dengan yang lainnya saling terkait erat. Oleh karena itu, segala konsep yang diajarkan dalam Islam tidaklah dapat diterapkan secara parsial. Konsep Islam perlu dan harus diterapkan secara *kaffah* (totalitas). Rancang bangun ekonomi Islam berdiri atas dasar (tauhid, adil, *nubuwwah*, *khilafah*, dan *ma'ad*), bersandar pada tiang (*multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*), dan terakhir adalah beratapakan akhlak. Sumber hukum Islam yang dipergunakan yaitu Al-qur'an, hadits & sunnah, ijma serta ijtihad dan qiyas. Prinsip dasar sistem ekonomi Islam, yakni: prinsip kebebasan individu, prinsip hak terhadap harta, prinsip ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, prinsip keamanan sosial, prinsip jaminan sosial, prinsip distribusi kekayaan secara meluas, prinsip larangan menumpuk kekayaan, prinsip larangan terhadap organisasi anti sosial dan prinsip kesejahteraan individu dan masyarakat.

Perubahan budaya yang besar diperlukan dalam membangun ekonomi masyarakat. Walaupun pemerintah pusat maupun daerah telah menjalankan program ekonomi kerakyatan, namun satu loncatan tinggi perlu dibuat untuk menyeberangi jurang yang memisahkan budaya petani dan bedagang kecil-kecilan kepada budaya masyarakat komersial yang canggih. Program ekonomi kerakyatan yang dibuat dengan memberikan modal kepada masyarakat hendaknya diiringi dengan perencanaan, pembinaan dan pengawasan agar usaha yang dijalankan oleh masyarakat tidak menjadi "*pedagang buluh kasab, ujung hilang pangkal lesap*". Sehingga dengan perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan akan tercipta pembangunan ekonomi yang maju serta dapat mengangkat taraf hidup masyarakat, terlepas dari belunggu kemiskinan dan kesengsaraan.

Langkah kongkrit awal untuk membangun ekonomi dengan konsepsi pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* (AEC) , yaitu : *Pertama*, menerapkan ekonomi Islam. *Kedua*, persiapan mental masyarakat. *Ketiga*, memperkuat potensi atau sumberdaya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito, *Ekonomi Indonesia Baru, kajian dan alternatif solusi menuju pemulihan*, (Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000).
- Abdul Qadim Zallum. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, cet. I (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002)
- Aulia Pohan. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, cet. I (Jakarta; Rajawali Pers, 2008)
- Murray N. Rothbard. *What has Government Done to Our Money? (Apa yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?)*, cet I (Jakarta; Granit, 2007)
- Nurul Huda, dll, *Ekonomi Makro Islam, Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Predana Media Group, 2008)
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, (Jakarta: LPFEUI, 2005), Edisi Ketiga
- Qardhawi, DR. Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Cet. I, (Jakarta: Rabbani Perss, 1997)
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo, Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Soediyono Reksoprayitno, *Ekonomi Makro Analisis IS-LM dan Permintaan Penawaran Agregatif*, (Yogyakarta: BPFE, 2000)